

**KADER MUHAMMADIYAH DALAM PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009-2012  
PERSPEKTIF POLITIK ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MASDA TANJUNG  
NIM 08370001**

**PEMBIMBING**

- 1. Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag**
- 2. Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

## ABSTRAK

Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi keagamaan yang besar mempunyai daya tawar yang cukup kuat terhadap dinamika perpolitikan di Indonesia. Dalam perkembangannya, hubungan Muhammadiyah dengan politik praktis terjadi pasang surut. Mulai dari hubungan struktural dengan Masyumi, sampai Khittah Ujung Pandang tahun 1971 yang mengharuskan Muhammadiyah untuk lepas dari ikatan partai politik. Pada masa reformasi ini Partai Amanat Nasional sebagai “anak kandung” Muhammadiyah juga mengalami pasangsurut hubungan struktural-kulturalnya. Meski PAN secara tidak langsung merupakan kendaraan politik Muhammadiyah, namun banyak kader dan simpatisan (warga) Muhammadiyah yang memilih aktif dalam partai lain. Fenomena ini juga terjadi di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penyebaran kader dan simpatisan Muhammadiyah dalam partai politik di Kabupaten Bantul tahun 2009 sampai 2012 dan bagaimana mereka memperjuangkan platform Muhammadiyah dalam perspektif politik Islam.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan di Dewan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul serta pada lima besar partai politik hasil pemilu 2009 lalu di Bantul. Data yang telah terkumpul kemudian dideskripsikan terlebih dahulu tentang penyebaran kader serta simpatisan Muhammadiyah dalam partai politik di Kabupaten Bantul. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan analisis pada pokok masalah tentang kinerja mereka dalam kedudukannya sebagai anggota dewan dalam berbagai partai politik terhadap implementasi platform Muhammadiyah yang ditinjau dari segi politik Islam.

Setelah membahas secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa: Tidak ada hubungan struktural antara Muhammadiyah dengan partai politik. Politik Muhammadiyah bersifat *high politics* yang mengutamakan politik yang bermoral dan tidak pragmatis. Kebijakan terhadap kader yang aktif dalam struktural Muhammadiyah untuk tidak merangkap jabatan menduduki struktural sebuah partai politik merupakan kebijakan secara nasional dan tidak mengikat. Muhammadiyah sebagai organisasi tidak selalu sama dengan kader Muhammadiyah dalam menyikapi dinamika perpolitikan yang ada. Beberapa kader Muhammadiyah yang duduk dalam struktural tingkat kecamatan dan kelurahan dijumpai aktif dalam struktural partai politik. Sedangkan sebagian besar kader dan simpatisan Muhammadiyah menjadi konstituen PAN. Tentang kinerja para kader Muhammadiyah yang duduk dalam lembaga legislatif, bahwa mereka lebih memperjuangkan kemaslahatan umat secara umum, sedangkan kader yang berada di PAN lebih terlihat dalam memperjuangkan platform Muhammadiyah yang *breakdown* ke dalam pembahasan rancangan peraturan daerah. Contohnya ialah perda tentang pembatasan peredaran minuman beralkohol yang telah disahkan awal tahun 2012, dan raperda tentang kawasan tanpa rokok.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
**PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH**  
Jl. Marsda Adisucipto . Telp. Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal: Skripsi Saudara Masda Tanjung

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Masda Tanjung

NIM : 08370001

Judul : **“Kader Muhammadiyah dalam Partai Politik di Kabupaten  
Bantul Tahun 2009-2012 Perspektif Politik Islam”**

Sudah apat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 03 Zulhijjah 1433 H

19 Oktober 2012 M

Pembimbing I

**Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag**  
**NIP. 19731105 199603 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH  
Jl. Marsda Adisucipto . Telp. Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Skripsi Saudara Masda Tanjung

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Masda Tanjung

NIM : 08370001

Judul : **"Kader Muhammadiyah dalam Partai Politik di Kabupaten  
Bantul Tahun 2009-2012 Perspektif Politik Islam"**

Sudah apat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 03 Zulhijjah 1433 H

19 Oktober 2012 M

Pembimbing II

**Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag**

**NIP. 19681020 199803 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH  
Jl. Marsda Adisucipto . Telp. Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/DSH/PP.09/192.B/2012

Skripsi/tugas akhir dengan judul : **KADER MUHAMMADIYAH DALAM  
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2009-2012  
PERSPEKTIF POLITIK ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Masda Tanjung  
NIM : 08370001  
Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Oktober 2012  
dengan nilai : A- (90)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I

Dr. H. Kamsi, M.A.  
NIP. 19570207198703 1 003

Penguji II

Dr. H.M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700806 199703 1 002

Yogyakarta, 18 Oktober 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. M. Nur, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

**SURAT PERNYATAAN**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
*Bismillahirrahmanirrahim*

Bersama dengan ini saya :

Nama : Masda Tanjung  
NIM : 08370001  
Semester : IX  
Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul: "*Kader Muhammadiyah dalam Partai Politik di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012 Perspektif Politik Islam*" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan diselesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 03 Zulhijjah 1433 H

19 Oktober 2012 M



Masda Tanjung  
NIM: 08370001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	<b>b</b>	be
ت	ta'	<b>t</b>	te
ث	sa'	<b>s</b>	es (dengan titik di atas)
ج	jim	<b>j</b>	je
ح	ha'	<b>h</b>	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	<b>kh</b>	ka dan ha
د	dal	<b>d</b>	de
ذ	zal	<b>z</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	<b>r</b>	er
ز	zai	<b>z</b>	zet
س	sin	<b>s</b>	es
ش	syin	<b>sy</b>	es dan ye
ص	sad	<b>s</b>	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	<b>d</b>	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	<b>t</b>	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	<b>z</b>	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	<b>'</b>	koma terbalik
غ	gain	<b>g</b>	ge
ف	fa	<b>f</b>	ef
ق	qaf	<b>q</b>	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

### C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأوليا	ditulis	<i>Karomah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذكر		ditulis	<i>zūkira</i>
	<i>dammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yaẓhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1	<b>Fathah + alif</b> جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	<b>Fathah + ya' mati</b> تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	<b>Kasrah + ya' mati</b> كريم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	<b>Dammah + wawu mati</b> فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<b>Fathah + ya' mati</b> بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	<b>Fathah + wawu mati</b> قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## **MOTTO**

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56)

“Iman itu adalah kepercayaan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan.” (HR. Ibnu Majjah)

“Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok pagi” (HR. Al Baihaqi)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain.”  
(Al Hadits)

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :**

**Ayahanda Bapak H. Sukarjan SP, S.Pd, dan Ibunda Istiqomah  
yang telah tulus berkorban demi kebahagiaan dan kesuksesan  
anak-anaknya.**

**Kakakku Novesta Tisnadi, S.Pd.I dan Nita Krisnawati**

**Adikku Lisa Romadhoni**

**Semoga kelak Allah mempersatukan kita semua di surga-Nya.**

**Amin.**

**Para Bapak dan Ibu Dosen yang tidak lelah menularkan ilmunya**

**Kampusku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam, Yang Maha Awal dan Maha Akhir, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Shalawat salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *Salallahu 'Alaihi wa Sallam*, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah mengamalkan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barangsiapa diberi petunjuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan, dan barangsiapa yang sisesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad *Salallahu 'Alaihi wa Sallam* adalah utusan Allah.

Atas berkah, hidayah dan karunia ilmu serta pertolongan-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *Kader Muhammadiyah dalam Partai Politik di Kabupaten Bantul tahun 2009-2012 Perspektif Politik Islam*.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya motivasi, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan rasa syukur dan terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag, selaku Penasehat Akademik (PA) dan Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingan pada proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Ocktoberrinsyah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan ketelitiannya dapat membantu dan mengarahkan proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penyusun, tidak lupa juga pada TU Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama TU Jurusan Jinayah Siyasah yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
7. Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul Periode 2010-2015, Ketua Fraksi PDI-P, PAN, Demokrat, PKS, dan Golkar DPRD Kabupaten Bantul dan seluruh responden yang tidak dapat disebutkan satu

per satu, atas kesediaan waktunya untuk memberikan data, informasi, dan keterangan terkait dengan penyusunan skripsi ini.

8. Ayahanda H. Sukarjan SP. S.Pd, ibunda Istiqomah, keluarga Novesta Tisnadi, S.Pd.I, dan Nita Krisnawati serta adik tercinta Lisa Romadhoni atas motivasi dan dukungannya.
9. Seluruh teman-teman kelas Jurusan Jinayah Siyash angkatan 2008, Tafsir, Putri, Indra, Mochtar, Fikri, Fatimah, Rizka dan lainnya yang telah memberikan semangat dan keceriaan bersama.
10. Seluruh Keluarga Besar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selamat berjuang dan semoga sukses selalu.
11. Seluruh Jamaah Mushola Nurul Islam Kedon dan Remaja Masjid Kedon serta adik-adik ImuT dan TPA Nurul Islam Kedon yang telah memberikan inspirasi serta telah bersama-sama merasakan indahnya ukhuwah dan nikmatnya memakmurkan rumah Allah swt.

Akhirnya semoga Allah swt., memberikan pahala dan keberkahan bagi kita semua. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan keilmuan dan peradaban. Amin.

Yogyakarta, 18 Zulkaidah 1433 H  
04 Oktober 2012 M

Masda Tanjung  
NIM: 08370001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	xi
KATA PERSEMBAHAN .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II: HUBUNGAN MUHAMMADIYAH DAN NEGARA .....</b>	<b>18</b>
A. Islam dan Ormas-Ormas Politik .....	18
B. Pandangan Muhammadiyah terhadap NKRI .....	25
C. Peran Muhammadiyah dalam Ranah Kenegaraan .....	27

<b>BAB III: KADER MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN BANTUL</b>	<b>33</b>
A. Peta Kader Muhammadiyah di Kabupaten Bantul .....	33
1. Peta Morfologi Kabupaten Bantul .....	33
2. Profil Dewan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul .....	37
3. Penyebaran Kader Muhammadiyah dalam Amal Usaha Muhammadiyah .....	44
a. Bidang Agama Islam .....	47
b. Bidang Pendidikan .....	48
c. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat .....	58
d. Bidang Politik .....	61
4. Kader Muhammadiyah dalam Partai Politik di Kabupaten Bantul .....	63
 <b>BAB IV: PERSPEKTIF POLITIK ISLAM</b> .....	 <b>78</b>
A. Penyebaran Kader dan Simpatisan Muhammadiyah dalam Partai Politik di Kabupaten Bantul .....	78
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) .....	78
2. Partai Amanat Nasional (PAN) .....	85
3. Partai Demokrat .....	88
4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) .....	93
5. Partai Golkar .....	98
B. Kinerja Kader Muhammadiyah dalam Memperjuangkan Platform Muhammadiyah melalui Partai Politik di Kabupaten Bantul .....	103
1. Platform Muhammadiyah .....	103
2. Implementasi Platform Muhammadiyah terhadap Kinerja Kader.....	108

<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	115
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran-Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	I
Daftar Terjemahan .....	II
Daftar Gambar dan Tabel .....	IV
Transkrip Wawancara .....	V
Biografi Ulama .....	XIV
ARSIP-ARSIP .....	XVII
Curriculum Vitae .....	XVIII

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Muhammadiyah<sup>1</sup> sebagai salah satu organisasi Islam besar di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembangunan Bangsa Indonesia. Dalam perjalanannya, organisasi yang berdiri pada tahun 1912 ini, telah memberikan banyak kontribusi bagi Bangsa Indonesia, khususnya dibidang keagamaan, sosial dan pendidikan.

Dalam sejarah, pendirian Muhammadiyah pada 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan mempunyai dimensi keagamaan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Kondisi umat Islam saat itu sangat tertinggal dalam berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan politik, baik karena faktor eksternal maupun faktor internal umat Islam sendiri. Disisi lain umat

---

<sup>1</sup> Secara terminologis, Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, berasaskan Islam (*Anggaran Dasar Muhammadiyah BAB II, Pasal 4 Ayat 1-2*) didirikan oleh KHA. Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Kota Yogyakarta. Gerakan ini diberi nama Muhammadiyah oleh pendirinya dengan maksud untuk *bertafa'ul* (berpengharapan baik) dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangannya dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya *'izzullIslam wal Muslimin*, kejayaan Islam sebagai relita dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realita. Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Ideologis*, (Yogyakarta: LPPI, 2003), hlm. 119.

muslimin sendiri pada saat itu masih kuat pemahaman sinkritis, yaitu masih dipraktikkannya ritual yang sarat takhayul, bid'ah dan khurafat.<sup>2</sup>

Dalam perjalanannya hubungan Muhammadiyah dengan negara, sangat menarik. Muhammadiyah ikut memegang peranan penting. Muhammadiyah yang dikenal sebagai gerakan dakwah sosio-kultural harus menjaga jarak dengan dunia politik praktis.

Meskipun Muhammadiyah bukan organisasi politik atau partai politik, tapi kontribusi Muhammadiyah terhadap politik keislaman tidaklah sedikit. Beberapa tokoh elit yang secara aktif memperjuangkan Muhammadiyah diantaranya adalah KH. Ahmad Dahlan pada masa penjajahan Belanda, KH. Mas Mansur dan Haji Rasul pada waktu pendudukan Jepang, KH. Abdul Kahar Muzakkiar, Sudirman, Mr. Kasman Singodirejo, HAMKA, KH. AR Facruddin hingga Prof. Dr. H.M. Amien Rais dan Prof. Dr. A. Syafi'i Ma'arif. Beberapa tokoh di atas telah memberikan kontribusi politik kepada negara dengan berpegang pada budaya politik Muhammadiyah yang *amar ma'rūf nahi munkar*.<sup>3</sup>

Dinamika relasi Muhammadiyah dengan Negara Indonesia memang fluktuatif. Untuk kesekian kalinya, independensi Muhammadiyah terhadap politik praktis mendapat ujian. Muhammadiyah tak ingin mengkhianati khittahnya,

---

<sup>2</sup> M. Yunan Yusuf, dkk, *Ensiklopedia Muhammadiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. xvi.

<sup>3</sup> Suwarno, *Relasi Muhammadiyah, Agama, dan Negara, Kontribusi Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 98.

namun ia juga tak ingin lepas begitu saja terhadap problema bangsa yang kompleks dan membutuhkan solusi yang nyata.

Belajar dari pengalaman dinamika perpolitikan di Indonesia pada tahun-tahun permulaan Orde baru, Muhammadiyah berkesimpulan bahwa akan lebih sehat jika melepaskan diri sama sekali dari keterkaitan dengan partai politik manapun. Sikap ini diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah di Ujung Pandang pada tahun 1971, dengan catatan bahwa anggota-anggotanya bebas menyalurkan aspirasi politiknya melalui parpol yang tidak merugikan Islam.<sup>4</sup>

Alasan mengapa Muhammadiyah mampu bertahan adalah karena organisasi ini sejak awal, menjauhkan diri dari bidang politik praktis, dan berusaha tetap mempertahankan jati dirinya sebagai gerakan kultural, sebagai organisasi dakwah, sosial-keagamaan, dan pendidikan. Meski demikian, Muhammadiyah tidak bersikap anti atau alergi terhadap bidang politik karena politik merupakan salah satu alat atau sarana dakwah Muhammadiyah. Merupakan pilihan yang cerdas (*an intelligent choice*), Muhammadiyah lebih memusatkan perhatian pada bidang dakwah, sosial-keagamaan, dan pendidikan, terbukti, karena telah menghindarkan Muhammadiyah dari resiko-resiko konfrontasi secara langsung dengan pemerintah yang sedang berkuasa, baik pemerintah kolonial Belanda hingga pemerintah Orde Baru.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Syafii Maarif, *Independensi Muhammadiyah di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000) hlm. 92.

<sup>5</sup> Suwarno, *Muhammadiyah sebagai Oposisi (Studi tentang Perilaku Politik Muhammadiyah Periode 1995-1998)*, (Yogyakarta: UII Press, 2002, cet k2) hlm. xi.

Lengsernya Orde Baru menimbulkan suasana politik yang tak menentu. Sudah menjadi keniscayaan munculnya tokoh-tokoh penggagas reformasi yang menawarkan ide-ide segar untuk menata kembali bangsa yang sempat goyah ini. Berbarengan dengan itu, mulai muncul berbagai partai-partai politik baru. Seiring dengan terbukanya keran demokrasi yang tak terbandung membuat rakyat Indonesia berbondong-bondong untuk menyalurkan *euforia* politiknya.

Citra Muhammadiyah yang *politicking* (ikut bermain politik) sangat terlihat saat Muhammadiyah berada di bawah kepemimpinan Amien Rais, hal tersebut diawali oleh pribadi Amien Rais selaku intelektual atau ilmuwan politik yang *concern* dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa.<sup>6</sup>

Peran politik Muhammadiyah menarik untuk dianalisis karena dengan perkembangan politik nasional pasca kejatuhan Orde Baru di era reformasi terjadi gejala politik baru berupa ledakan partisipasi politik rakyat yang besar dan kelahiran partai-partai politik baru seperti Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpin oleh Dr. M. Amien Rais, yang sedikit atau banyak bersentuhan dengan keberadaan dan dinamika gerakan Muhammadiyah.<sup>7</sup>

Dalam hal ini, etika dan perilaku Muhammadiyah dalam berpolitik menjadi taruhannya, karena Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan dan mempunyai

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 60.

<sup>7</sup> Haedar Nashir, *Dinamika Politik Muhammadiyah*, (Malang: UMM Press, 2006), hlm.109.

sifat kehati-hatian saat bersentuhan dengan dunia politik praktis. Pada dasarnya politik Muhammadiyah adalah politik yang dilandasi dengan akhlak mulia dan moral karena itu merupakan bagian dari dakwah Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah politik juga dapat bertujuan baik karena menyangkut kehidupan umat.<sup>8</sup>

Pada Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab I Pasal 1 Ayat 1, dakwah *amar ma'rūf nahi munkar* sangat melekat pada identitas nama gerakan ini. Budaya politik yang dikembangkan oleh Muhammadiyah sejak awal dan masih relevan hingga kini. Ada Doktrin dakwah amar *amar ma'rūf nahi munkar*, diadopsi secara langsung dari *al-Qur'ān*, yang sering dianggap sebagai ayat Muhammadiyah, yaitu:

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم  
المفلحون<sup>9</sup>

Pada perkembangannya, Muhammadiyah yang sudah berusia satu abad ini, semakin menunjukkan taringnya. Sikap kritis yang sering dilemparkan oleh ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Din Syamsudin terhadap kondisi bangsa ini menjadi bukti bahwa Muhammadiyah ingin berperan dalam penyelesaian masalah bangsa.

Kota Yogyakarta yang menjadi kota tempat dibentuknya Muhammadiyah, merupakan basis masa Muhammadiyah. Bantul yang merupakan salah satu

---

<sup>8</sup> Syafii Maarif, *Independensi Muhammadiyah di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000) hlm. 95-96.

<sup>9</sup> Ali Imran (3) : 104

kabupaten di DIY yang berdekatan langsung dengan ‘Kota Muhammadiyah’ ini juga banyak warganya yang beraviliasi kepada organisasi tersebut.

Saat pemilihan umum presiden, DPR, DPRD atau kepala daerah, simpatisan Muhammadiyah menjadi menarik bagi yang berkepentingan. Hal ini karena warga Muhammadiyah, khususnya di Bantul juga tak beda jauh dengan daerah lainnya yang merupakan ‘pundi-pundi’ suara saat pesta demokrasi tiba.

Menarik jika penelitian ini dapat menghasilkan suatu gambaran riil sejauh mana warga Muhammadiyah menentukan afiliasi politiknya. Begitu juga dengan kadernya, apakah juga berafiliasi pada partai politik tertentu atau tidak dan sejauh mana mereka dapat memperjuangkan platform Muhammadiyah. Penelitian lapangan juga menjadi sarana untuk mengungkapkan jawaban dari pertanyaan diatas.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka agar dapat menjelaskan permasalahan serta dapat mencapai tujuan sesuai yang dikaji, perlu adanya suatu perumusan masalah. Adapun rumusan pokok masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebaran kader dan simpatisan Muhammadiyah dalam partai politik di Kabupaten Bantul tahun 2009 sampai 2012?
2. Bagaimana mereka memperjuangkan platform Muhammadiyah dalam perspektif politik Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk Mengetahui penyebaran kader dan simpatisan Muhammadiyah dalam partai politik di Kabupaten Bantul tahun 2009 sampai 2012 menurut perspektif politik Islam.
2. Mengetahui sejauh mana peran kader dan simpatisan Muhammadiyah dalam memperjuangkan platform Muhammadiyah tahun 2009 sampai 2012 menurut perspektif politik Islam.

Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kegunaan yang bisa diambil diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan terhadap penyusun dan pembaca sekalian, akademisi, analis/pengamat, dan mahasiswa tentang peran Muhammadiyah dalam perpolitikan di Kabupaten Bantul.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi dalam pengembangan dakwah Muhammadiyah khususnya dalam bidang politik serta acuan bagi politisi, organisatoris, pengamat politik, dan masyarakat luas pada umumnya tentang peta penyebaran

kader dan simpatisan Muhammadiyah dalam partai politik di Kabupaten Bantul.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh ini, penulis belum menemukan kajian tentang peran Muhammadiyah dalam partai politik khususnya di Kabupaten Bantul. Namun ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan tentang Muhammadiyah dan politik, diantaranya:

Skripsi Martoyo, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Pemberdayaan Politik Perempuan Perspektif Muhammadiyah”<sup>10</sup>, skripsi ini membahas tentang pandangan Muhammadiyah terhadap peran perempuan dalam perpolitikan di Indonesia. Penelitian ini membahas bagaimana Muhammadiyah menyikapi semakin banyaknya kaum perempuan yang terjun di dunia politik serta banyak perempuan yang telah menduduki posisi strategis di dalam struktur pemerintahan.

Skripsi Syafruddin, “Peran Politik Muhammadiyah Era Reformasi (Studi Kritis Perilaku Perilaku Politik Muhammadiyah di Era Reformasi 1998-2000).”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Martoyo, “Pemberdayaan Politik Perempuan Perspektif Muhammadiyah”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<sup>11</sup> Syafruddin, “Peran Politik Muhammadiyah Era Reformasi (Studi Kritis Perilaku Perilaku Politik Muhammadiyah di Era Reformasi 1998-2000)”, *Skripsi* Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Skripsi tersebut mengkaji bagaimana Muhammadiyah ikut berperan dalam dinamika politik yang pada saat itu tidak menentu. Tumbangnya Orde Baru memunculkan tokoh-tokoh penggiat reformasi, salah satunya adalah Amien Rais yang juga sebagai elit Muhammadiyah. Dalam hal ini peran Muhammadiyah semakin terlihat. Hal ini memperlihatkan bahwa Muhammadiyah juga dapat berperan dalam sektor politik, tidak hanya dalam hal kesehatan dan pendidikan.

Skripsi Muhammad Fatkul Ansyori, “Respon Muhammadiyah terhadap Politik Islam Pemerintah Hindia Belanda (1912-1942)”.<sup>12</sup> Skripsi ini membahas tentang respon dan sikap Muhammadiyah terhadap politik Hindia Belanda pada masa penjajahan.

Skripsi Jemi Carter Ropi, “Etika Politik dalam Perspektif Muhammadiyah (1997-2003)”.<sup>13</sup> Skripsi tentang etika dalam berpolitik perspektif Muhammadiyah ini mengkaji bagaimana sikap dan perilaku Muhammadiyah dalam berpolitik. Berkaitan dengan momen munculnya gagasan Reformasi tak lepas dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, seperti Amien Rais. Bagaimana Muhammadiyah tampil sebagai roda politik dengan penuh etika.

---

<sup>12</sup> Muhammad Fatkul Ansyori, “Respon Muhammadiyah terhadap Politik Islam Pemerintah Hindia Belanda (1912-1942)”, *Skripsi* Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

<sup>13</sup> Jemi Carter Ropi, “Etika Politik dalam Perspektif Muhammadiyah (1997-2003)”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Ada beberapa buku mengenai Muhammadiyah dan politik, salah satunya ialah buku karya Haedar Nashir yang berjudul *Dinamika Politik Muhammadiyah*<sup>14</sup>. Buku ini membahas tentang hubungan dan peran Muhammadiyah terhadap dinamika perpolitikan di Indonesia.

Buku karangan Prof. Dr. A. Syafi'i Ma'arif yang berjudul *Independensi Muhammadiyah di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik*, membahas tentang sikap dan peran Muhammadiyah dalam menghadapi pergumulan politik yang tak menentu. Disini independensi Muhammadiyah diuji, sebagai organisasi non-politik Muhammadiyah harus tetap tampil sebagai organisasi yang mempunyai andil dalam penyelesaian persoalan-persoalan bangsa, namun tetap dalam batas-batas sikap keorganisasian.

Syarifuddin Jurdi, dalam bukunya *Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*<sup>15</sup> memaparkan hubungan Muhammadiyah dengan negara masa Orde Baru sampai pasca Orde Baru, yaitu masa reformasi. Bagaimana keterlibatan Muhammadiyah dalam mewarnai dinamika politik Indonesia dan wacana-wacana Muhammadiyah terhadap permasalahan yang timbul dalam perjalanan bangsa ini.

---

<sup>14</sup> Haedar Nashir, *Dinamika Politik Muhammadiyah*, (Malang: UMM Press, 2006)

<sup>15</sup> Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Dari berbagai kajian dan penelitian yang telah ada, judul skripsi yang diangkat oleh penyusun berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya. Pada skripsi ini lebih ditekankan kepada penyebaran kader dan simpatisan Muhammadiyah dalam lima besar partai politik pemenang pemilu 2009 di Bantul. Selain itu penelitian ini juga bertujuan mendeskripsikan kinerja para kader Muhammadiyah yang duduk dalam partai politik atau khususnya para anggota legislatif dalam memperjuangkan platform Muhammadiyah.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Agar penulis mudah dalam melakukan kegiatan penelitian ini, maka perlu ada kerangka berpikir sebagai acuan dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap objek penelitian dan meluasnya pembahasan ke arah yang tidak signifikan. Kerangka pemikiran merupakan teori dan pendapat para ilmuwan yang tentunya berkorelasi dengan objek yang diteliti serta dapat memberikan dasar pemikiran yang kuat dalam suatu penelitian hingga diakui kebenarannya dalam mendukung suatu hipotesis.

Pada tahap permulaan, penulis memaparkan teori peran. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan yang kebetulan dipegang aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga berperilaku tertentu. Peranan lebih menunjuk pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi

seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat sebagai organisasi.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Gross, Mason dan McEachern mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbang dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat, maksudnya: kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh “masyarakat” di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan lainnya. Kadang-kadang para ahli sosiologi menggambarkan peranan-peranan dalam arti apa yang diharapkan dan dituntut oleh

---

<sup>16</sup> Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 269.

masyarakat. Talcott Palson membedakan apa yang diharapkan oleh masyarakat Amerika terhadap para dokter dan terhadap para pengusaha.<sup>17</sup>

Di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: 1). Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, 2). Harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap “masyarakat” atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranan atau kewajiban-kewajibannya.<sup>18</sup>

Teori yang kedua adalah teori mengenai partai politik. Korelasi dengan pembahasan tentang peran ialah bahwa salah satu sarana untuk mengatualisasikan peran itu ialah partai politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Menurut Sigmund Neamann sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo partai politik adalah:

Organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-

---

<sup>17</sup> David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Cet. Ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 105.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.<sup>19</sup>

Jika peran adalah harapan yang dikenakan pada individu pada kedudukan sosial tertentu maka fungsi memiliki arti pekerjaan dan pola perilaku yang diharapkan dalam manajemen dan ditentukan berdasarkan status yang ada padanya.

Hubungan antara pengertian peran, fungsi dan posisi adalah bahwa peran adalah harapan atau tuntutan terhadap seseorang dalam berperilaku sebagai apa sedangkan fungsi ialah pekerjaan atau pola perilaku seseorang dan semua itu tadi dikaitkan dengan keberadaan statusnya dalam menduduki sebuah posisi yang ada dalam masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *field research* yaitu penulis terjun langsung ke lapangan yang menjadi obyek penelitian. Dalam memperoleh data-data, penulis melakukan wawancara dengan obyek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode *deskriptif-analitik*. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran

---

<sup>19</sup> Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 16.

mengenai fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Deskriptif adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang akurat dan terperinci mengenai fakta tentang suatu fenomena yang ada. Sementara metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti dalam situasi tertentu.<sup>20</sup>

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah sumber data yang langsung dapat diteliti melalui wawancara, yakni mereka yang terlibat langsung dalam struktur lembaga yang akan diteliti. Para kader Muhammadiyah yang duduk dalam partai politik di Kabupaten Bantul, khususnya para kader yang menjadi anggota dewan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ialah peran Muhammadiyah dalam partai politik di Kabupaten Bantul, kontribusi para kadernya dalam membawa aspirasi politik pengikut organisasi tersebut.

### 4. Jenis Sumber Data

#### a. Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama data penelitian adalah wawancara langsung dengan narasumber. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada informan yang berkaitan langsung maupun

---

<sup>20</sup> Ulbert, Silalahi, *Metode dan Metodologi Penelitian*, (Bandung: Bina Budaya, 1999), hlm. 6-7.

tidak langsung dengan tema pembahasan. Selain itu juga data-data berupa dokumen dan arsip organisasi yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder, meliputi buku-buku yang memuat tentang Muhammadiyah dan politik, majalah, koran serta sumber lainnya yang masih relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya ialah pengolahan data. Pengolahan data yang dilakukan oleh penyusun adalah dengan metode *deskriptif analitik*, yaitu metode yang menggunakan pencarian fakta dan data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini kemudian dianalisa dengan kerangka pemikiran yang telah disusun dengan cermat dan terarah.<sup>21</sup> Metode tersebut meliputi pengumpulan data, menyusun, menganalisa serta menginterpretasi data dengan penarikan kesimpulan.

**G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dapat bersifat sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka dalam pembahasan ini dibagi menjadi lima yang terdiri dari beberapa sub bab.

---

<sup>21</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hlm. 20-21.

Bab pertama, pendahuluan yang merupakan pengantar pembahasan secara global. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang hubungan Muhammadiyah dan negara. Lebih rincinya, bab ini membahas tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah bersama ormas-ormas Islam lainnya, pandangan Muhammadiyah terhadap NKRI serta peran Muhammadiyah dalam ranah kenegaraan.

Bab ketiga, membahas tentang peta kader Muhammadiyah di Kabupaten Bantul. Kemudian juga kader Muhammadiyah dalam partai politik. Dalam bab ini juga diulas bagaimana hubungan Muhammadiyah Kader dan Partai Politik dalam Konteks Realita.

Bab keempat menjelaskan peran kader Muhammadiyah dalam partai politik di Kabupaten Bantul. Didalamnya dibahas tentang penyebaran kader dan simpatisan Muhammadiyah dalam partai politik dan kinerja kader Muhammadiyah dalam memperjuangkan platform Muhammadiyah melalui partai politik di Kabupaten Bantul tahun 2009 sampai 2012, selain itu juga dianalisis menurut perspektif politik Islam.

Bab ke lima berisikan kesimpulan penelitian dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dianalisis secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebaran kader dan simpatisan Muhammadiyah dalam parti politik di Kabupaten Bantul tidak hanya dalam satu patai saja. Beberapa kader Muhammadiyah yang duduk dalam struktural tingkat kecamatan dan kelurahan dijumpai aktif dalam struktural partai politik. Memang sebagian besar kader yang sudah tidak aktif dalam struktural Muhammadiyah lebih memilih aktif di PAN. Sedangkan sebagian simpatisan Muhammadiyah memang lebih condong menjadi konstituen PAN, meski pemilu 2009 lalu sebagian beralih ke partai lain seperti PKS dan Demokrat. Bagi kader dan simpatisan Muhammadiyah yang telah lama berkiprah dalam dunia politik praktis sebelum era reformasi, mereka memang sudah aktif dalam partai-partai yang sudah ada sejak Orde Baru yaitu PPP dan Golkar.
2. Kinerja para kader Muhammadiyah yang duduk dalam lembaga legislatif dapat disimpulkan mereka lebih memperjuangkan kemaslahatan umat secara umum, menurut platform masing-masing partai. Sedangkan kader yang berada di PAN lebih terlihat dalam memperjuangkan platform Muhammadiyah yang diimplementasikan ke dalam pembahasan rancangan peraturan daerah. Salah satunya ialah perda tentang pembatasan peredaran minuman beralkohol yang telah disahkan pada awal tahun 2012, dan saat ini mereka sedang memperjuangkan rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok agar dapat disahkan menjadi perda.

## **B. Saran-saran**

Kajian dalam skripsi ini adalah salah satu bentuk dan cara untuk menjawab anggapan yang berkembang tentang dinamia perpolitikan yang berkembang dalam masyarakat yang berkaitan dengan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam serta perannya terhadap dinamika tersebut khususnya di Kabupaten Bantul. Untuk selanjutnya Muhammadiyah sebaiknya tetap memegang Khittah Ujung Pandang meski realitas dalam masyarakat berbeda. Selain itu juga Muhammadiyah harus dapat membina hubungan baik dengan semua partai politik, tidak hanya dengan PAN saja. Dengan peran Muhammadiyah terhadap semua partai maka diharapkan nantinya melalui kader-kadernya, apa yang menjadi platform Muhammadiyah akan terealisasi dengan baik dan sinergis, sehingga apa yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah untuk menjadikan masyarakat yang utama (masyarakat madani) dapat terwujud dalam bingkai kenegaraan yang *baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafurun*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1999.

### B. Buku

Abdullah, Slamet dan M. Muslich KS, *Seabad Muhammadiyah dalam Pergumulan Budaya Nusantara* Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2010.

Amal, Ichsanul (ed), *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.

Aminati, Siti, *Pendidikan Kemuhammadiyah Kelas 7*, Yogyakarta: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PWM DIY, 2008.

Berry, David, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Cet. Ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Budiardjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Fakhruddin, AR, dkk, *Pergumulan Pemikiran Dalam Muhammadiyah*, Yogyakarta: SIPRESS, 1990.
- Hambali, Hamdan, *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Iyunk, Bahrus urur, *Teologi Amal Saleh, Membongkar Nalar Kalam Muhammadiyah Kontemporer*, Surabaya: LPAM, 2005.
- Jurdi, Syarifuddin, *Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Jurdi, Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kamal Pasha, Musthafa dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: LPPI, 2003.
- Kamaruddin, *Partai Politik di Pentas Reformasi: Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004*, Jakarta: Visi Publishing, 2003.
- Maarif, Syafii, *Independensi Muhammadiyah di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000.
- Mustika Rahma, Dewi, *Pendidikan Kemuhammadiyah Kelas 8*, Yogyakarta: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PWM DIY, 2008.
- Munir Mulkhan, Abdul, *Marhaenis Muhammadiyah*, Yogyakarta: Galang Press, 2010.
- Nashir, Haedar, *Dinamika Politik Muhammadiyah*, Malang: UMM Press, 2006.

- Pasha, Musthafa Kamal dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Ideologis*, Yogyakarta: LPPI, 2003.
- Purnama Bahtiar, Asep, *Membaca Ulang Dinamika Muhammadiyah*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2004.
- Rais, Amien, dkk. *Muhammadiyah dan Reformasi*, Yogyakarta: Aditya Media, 2000.
- Sairin, Weinata, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Silalahi, Ulbert, *Metode dan Metodologi Penelitian*, Bandung: Bina Budaya, 1999.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta : Rineka Cipta, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Keempat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suwarno, *Muhammadiyah sebagai Oposisi (Studi tentang Perilaku Politik Muhammadiyah Periode 1995-1998)*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Tim Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah* Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
- Yusuf, M. Yunan, dkk, *Ensiklopedia Muhammadiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

### C. Skripsi

Ansyori, Muhammad Fatkul, “Respon Muhammadiyah terhadap Politik Islam Pemerintah Hindia Belanda (1912-1942), *Skripsi* Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

Martoyo, “Pemberdayaan Politik Perempuan Perspektif Muhammadiyah”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Rabiah, “Muhammadiyah dan Masyarakat Madani, Peran Muhammadiyah dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia Pasca Reformasi (1998-2007)” *skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007

Ropi, Jemi Carter, “Etika Politik dalam Perspektif Muhammadiyah (1997-2003)”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Syafruddin, “Peran Politik Muhammadiyah Era Reformasi (Studi Kritis Perilaku Perilaku Politik Muhammadiyah di Era Reformasi 1998-2000), *Skripsi* Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

### D. Majalah dan Internet

*Suara Muhammadiyah*, edisi 21 Jumadal Ula- 4 JumadaT Tsaniyah 1430 H.

[http://www.bantulkab.go.id/pemerintahan/bantul\\_projotamansari.html](http://www.bantulkab.go.id/pemerintahan/bantul_projotamansari.html)

[http://www.bantulkab.go.id/pemerintahan/visi\\_misi.html](http://www.bantulkab.go.id/pemerintahan/visi_misi.html)

[http://www.bantulkab.go.id/datapokok/1101\\_politik.html](http://www.bantulkab.go.id/datapokok/1101_politik.html)

<http://www.kpubantul.go.id>

<http://www.muhammadiyah.or.id/content-54-det-struktur-organisasi.html>

<http://www.news.okezone.com/read/2012/03/15/339/593719/baitul-muslimin-kampanyekan-islam-kebangsaan>

<http://www.quran.com>

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Lampiran I:**

**DAFTAR TERJEMAHAN**

<b>Halaman</b>	<b>Footnote</b>	<b>Terjemahan</b>
<b>BAB I</b>		
5	9	“Dan hendaklah ada di antara kamu suatu kelompok umat (jamaah) yang menyeru manusia kepada kebajikan, menyuruh yang ma’ruf dan mencegah yang munkar, dan jamaah seperti itulah yang mendapat kemenangan.”
27	18	“Makanlah oleh mu dari rizki mu yang (dianugerahkan) oleh Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun.”
<b>BAB III</b>		
45	9	Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”
48	13	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
60	24	Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?, Itulah orang yang meghardik

		anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat ria', dan enggan (menolong dengan) barang berguna.
<b>BAB IV</b>		
83	8	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
112	50	Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah , mengerjakan amal shaleh dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?” dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolak lah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.
114	51	Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat ari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

**Lampiran II:**

**DAFTAR GAMBAR DAN TABEL**

**1. GAMBAR**

<b>No.</b>	<b>Nama Gambar</b>	<b>BAB</b>	<b>Halaman</b>
I	Bagan Struktur Organisasi Muhammadiyah	III	41

**2. TABEL**

<b>No.</b>	<b>Nama Tabel</b>	<b>BAB</b>	<b>Halaman</b>
1	Susunan Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul Periode 2010-2015	III	42
2	Susunan Anggota Majelis Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul Periode 2010-2015	III	43
3	Daftar SD dan MI Muhammadiyah di Kabupaten Bantul	III	52
4	Daftar SMP dan MTs Muhammadiyah di Kabupaten Bantul	III	56
5	Daftar SMA dan SMK Muhammadiyah di Kabupaten Bantul	III	57
6	Daftar Rumah Sakit Umum dan Balai Pengobatan Muhammadiyah di Kabupaten Bantul	III	61
7	Daftar Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F PDI-P) DPRD Bantul	IV	81
8	Daftar Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Bantul	IV	86
9	Daftar Anggota Fraksi Partai Demokrat (F-Demokrat) DPRD Bantul	IV	90
10	Daftar Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Bantul	IV	97
11	Daftar Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) DPRD Bantul	IV	101

### Lampiran III:

#### TRANSKRIP WAWANCARA

##### 1. Wawancara dengan D. Radjut Sukasworo (Kabid. Organisasi DPC PDI-P Bantul)

A. *Apakah platform Partai PDI-P?*

PDI-P adalah partai terbuka yang berasaskan Pancasila

B. *Apakah definisi kader dan simpatisan PDI-P itu?*

Kader PDI-P didefinisikan sebagai anggota partai yang telah matang dan telah menjalani pendidikan kader, sedangkan simpatisan adalah sebagai pemilih/konstituen.

C. *Siapa saja yang menjadi basis konstituen PDI-P?*

Basis masa, kalangan menengah kebawah, di daerah yang terdapat keragaman (*abangan*)

D. *Berapakah peringkat perolehan suara PDI-P pada pemilu 2009 lalu di Bantul dan berapa kursi yang didapat?*

Peringkat pertama dan mendapat 11 kursi.

E. *Bagaimanakah kaitan antara latar belakang ormas keagamaan dengan konstituen PDI-P?*

Latar belakang konstituen PDI-P berasal dari berbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Di Bantul sendiri, jika dilihat dari latar belakang organisasi keagamaannya, banyak yang berasal dari kalangan Muhammadiyah. Secara organisasi memang tidak ada kaitannya antara PDI-P dengan Muhammadiyah.

F. *Apakah ada kader Muhammadiyah yang menjadi kader struktural PDI-P tingkat Kabupaten/kecamatan?*

Tidak ada.

G. *Bagaimana kinerja para anggota dewan dari PDI-P dalam memperjuangkan platform?*

Sebulan sekali pertemuan rutin untuk menterjemahkan platform partai. Kader PDI-P dituntut untuk memperjuangkan nasib rakyat, membela hak-hak rakyat kecil dan menjadi penyambung lidah *wong cilik*.

**2. Wawancara dengan Drs. H. Agus Subagyo, Ketua DPD II Partai GOLKAR Kab. Bantul sekaligus Ketua Fraksi Partai GOLKAR DPRD Bantul**

*A. Apakah platform Partai Golkar?*

Partai Golkar adalah partai terbuka bagi semua golongan dan agama, bukan partai sektarian, sehingga semua boleh menjadi anggota partai, termasuk sebagai anggota ormas keagamaan.

*B. Apakah definisi kader dan simpatisan Partai Golkar?*

Kader Partai adalah anggota yang telah mengikuti pendidikan dan latihan kader dan disaring atas dasar beberapa kriteria menurut AD/ART, simpatisan adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki satu pandangan politis yang sama dengan Golkar.

*C. Siapa saja yang menjadi basis konstituen Partai Golkar?*

Basis massa atau simpatisan Partai Golkar berasal dari berbagai lapisan masyarakat, agama dan golongan. Sedangkan jika dilihat dari daerahnya maka basis simpatisan partai ini berada di pedesaan dengan profesi yang beragam, mulai dari petani, pedagang dan birokrat.

*D. Berapakah peringkat perolehan suara Partai Golkar pada pemilu 2009 lalu di Bantul dan berapa kursi yang didapat?*

Peringkat lima, mendapat lima kursi.

*E. Bagaimanakah kaitan antara latar belakang ormas keagamaan dengan konstituen Golkar?*

Jika dilihat dari latar belakang organisasi keagamaan, kader dan simpatisan Partai Golkar di Bantul berasal dari berbagai organisasi keagamaan, diantaranya adalah Muhammadiyah, NU, dan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia).

*F. Apakah ada kader Muhammadiyah yang menjadi kader struktural Partai Golkar tingkat Kabupaten/kecamatan?*

Dari lima kader Golkar yang duduk di kursi legislatif ada satu yang berasal dari lingkungan Muhammadiyah yaitu Arni Tyas Palupi, ST. Bahkan ayahnya adalah seorang tokoh kader Muhammadiyah yang berpengaruh di daerah Bantul yaitu Drs. H. Samedi Prastowo yang juga sebagai mantan ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bantul. Pada tingkat kecamatan dan kelurahan ada beberapa pengurus PK dan PD yang aktif sebagai pengurus struktural Muhammadiyah di tingkat

kecamatan dan kelurahan. Sebagai partai tengah dan terbuka, Golkar tidak terlalu menonjolkan sektarian atau berasal dari ormas apakah kadernya itu.

*G. Bagaimana kinerja para anggota dewan dari Golkar dalam memperjuangkan platform?*

Platform Golkar adalah Karya dan Kekaryaannya berarti bahwa seseorang tersebut dituntut untuk dapat berkarya dan bekerja untuk kepentingan manusia lain (umat) sehingga doktrin tersebut merupakan salah satu upaya agar seseorang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Tak lain saat bertugas sebagai wakil rakyat (DPRD) mereka memperjuangkan kepentingan rakyat untuk kesejahteraan.

### **3. Wawancara dengan Nur Rakhmat JP, A.Md., Ketua DPC Partai Demokrat Bantul sekaligus sebagai sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Bantul**

*A. Apakah platform Partai Demokrat?*

Partai Demokrat merupakan partai yang terbuka untuk semua warga Negara Republik Indonesia, tanpa membedakan suku bangsa, ras, profesi, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

*B. Apakah definisi kader dan simpatisan Partai Demokrat?*

Partai Demokrat mendefinisikan kader adalah penggerak partai yang telah memiliki komitmen terhadap partai serta telah melalui tahap pembinaan kader. Kader juga didefinisikan sebagai anggota yang menjadi pengurus struktural partai. Sedangkan simpatisan Partai Demokrat didefinisikan sebagai pengikut atau orang yang bukan termasuk ke dalam struktural partai namun memiliki kesamaan pandangan politik terhadap platform Partai Demokrat. Simpatisan juga sebagai pemilih atau konstituen partai saat pemilihan umum berlangsung.

*C. Siapa saja yang menjadi basis konstituen Partai Demokrat?*

Basis massa Partai Demokrat di Kabupaten Bantul begitu beragam, dari berbagai agama dan golongan serta berbagai organisasi kemasyarakatan. Karena Partai Demokrat merupakan partai terbuka, maka siapa pun sebagai WNI dapat menjadi anggota partai.

*D. Berapakah peringkat perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu 2009 lalu di Bantul dan berapa kursi yang didapat?*

Peringkat tiga, mendapat lima kursi.

E. *Bagaimanakah kaitan antara latar belakang ormas keagamaan dengan konsituen Parati Demokrat?*

Jika dilihat dari latar belakang organisasi keagamaan yang ada di Bantul, konstituen Partai Demokrat lebih banyak dari warga Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini menurut Ketua DPC Partai Demokrat Bantul, karena warga Muhammadiyah lebih condong ke satu partai tertentu, namun tidak sedikit juga pemilih Partai Demokrat yang berasal dari warga Muhammadiyah.

F. *Apakah ada kader Muhammadiyah yang menjadi kader sruktural Partai Demokrat tingkat Kabupaten/kecamatan?*

Dari kelima kadernya yang duduk di DPRD, anggota legislatf dari Partai Demokrat ini semuanya beragama Islam. Jika dilihat dari paham atau afiliasi ormasnya, dari kelima kader tersebut, tiga berpaham nasionalis sedangkan dua kadernya lebih condong berpaham religius dengan afiliasi organisasi keagamaannya adalah Muhammadiyah. Bahkan salah satu kadernya pernah aktif sebagai pengurus Muhammadiyah di tingkat Kecamatan.

G. *Bagaimana kinerja para anggota dewan dari Partai Demokrat dalam memperjuangkan paltform?*

Dalam perjuangannya di badan legislatif, Partai Demokrat konsisten dengan ideologinya yang aspiratif dan demokratis. Kader Partai Demokrat dituntut untuk dapat memperjuangkan aspirasi rakyat yang berkaitan dengan kemaslahatan, kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam arti kata partai ini berjuang sesuai dengan apa yang diyakini dan nanti muaranya untuk kebaikan masyarakat.

**4. Wawancara dengan Jupriyanto,S.Si., Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Bantul.**

A. *Apakah platform Partai PKS?*

Partai Keadlin Sejahtera adalah partai yang berasaskan Islam yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera

B. *Siapa saja kah yang menjadi basis konstituen PKS?*

Basis konstituen PKS di Bantul pada umumnya adalah umat Islam. Jika pemilu 2004 lalu, konstituen PKS lebih banyak dari kalangan menengah atas namun berkat sosialisasi pada pemilu 2009 lalu pemilih PKS banyak yang dari menengah ke bawah (pedesaan)

C. *Apakah definisi kader dan simpatisan PKS?*

Kader adalah anggota partai yang telah mengikuti tahap-tahap pendidikan kader dan siap untuk diposisikan dan ditugaskan dalam berbagai lini dalam pemerintahan. Simpatisan adalah para pemilih PKS saat pemilu (konstituen).

D. *Berapakah peringkat perolehan suara PKS pada pemilu 2009 lalu di Bantul dan berapa kursi yang didapat?*

Peringkat empat, lima kursi.

E. *Bagaimanakah kaitan antara latar belakang ormas keagamaan dengan konsituen PKS?*

Konstituen PKS berasal dari berbagai macam ormas keagamaan, diantaranya adalah Muhammadiyah dan NU.

F. *Apakah ada kader Muhammadiyah yang menjadi kader struktural PKS tingkat Kabupaten/kecamatan?*

Kader Muhammadiyah yang berada dalam struktural PKS dapat dikatakan tidak sedikit. Lebih-lebih simpatisan Muhammadiyah yang terjun sebagai pengikut PKS. Fenomena kader Muhammadiyah yang aktif dalam PKS memang tidak jauh berbeda dari daerah-daerah lain maupun secara nasional. Banyak kader Muhammadiyah yang aktif di PKS, tingkat kelurahan, kecamatan atau kabupaten, termasuk saya.

G. *Bagaimana kinerja para anggota dewan dari PKS dalam memperjuangkan platform?*

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera selalu berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya bagi konstituennya. Namun dalam mengakomodir aspirasi konstituennya, PKS tidak membedakan asal organisasi kemasyarakatan atau keagamaannya. Semua diakomodir untuk kepentingan rakyat. PKS lebih mengutamakan kinerja sesuai dengan nilai-nilai yang dibawanya, yaitu memberikan kontribusi untuk kemaslahatan umat, khususnya yang berkaitan dengan keadilan serta kesejahteraan rakyat.

**5. Wawancara tertulis dengan Mahmud Ardi Widanto, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PAN Kabupaten Bantul.**

A. *Apakah platform Partai PAN?*

Partai Amanat Nasional atau PAN adalah partai politik di Indonesia yang bersifat terbuka, majemuk, dan mandiri. PAN bertujuan

menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual.

*B. Siapa saja kah yang menjadi basis konstituen PAN?*

Sebagian besar basis konstituen PAN adalah warga Muhammadiyah.

*C. Apakah definisi kader dan simpatisan PAN?*

Kader adalah pengurus patai dan telah melalui berbagai pembinaan kaderisasi. Simpatisan adalah para pemilih PAN saat pemilu.

*D. Berapakah peringkat perolehan suara PAN pada pemilu 2009 lalu di Bantul dan berapa kursi yang didapat?*

Peringkat dua, PAN mendapat tujuh kursi.

*E. Bagaimanakah kaitan antara latar belakang ormas keagamaan dengan konsituen PAN?*

Dalam berbagai kajian dan survei yang pernah dilakukan oleh DPD PAN Bantul, bahwa mayoritas anggota dan simpatisan PAN adalah warga Muhammadiyah. Hal ini emang tidak dapat dilepaskan dari sejarah PAN.

*F. Apakah ada kader Muhammadiyah yang menjadi kader sruktural PAN tingkat Kabupaten/kecamatan?*

Sebagian besar kader PAN adalah kader Muhammadiyah, secara kultural memang PAN tidak dapat dilepaskan dari Muhammadiyah, namun secara organisatoris/struktural tidak ada kaitannya.

*G. Bagaimana kinerja para anggota dewan dari PAN dalam memperjuangkan platform?*

Anggota legislatif dari PAN selalu berusaha aspratif dan memperjuangkan kepentingan konstituen dan kepentingan rakyat pada umumnya. Dalam menghadapi setiap momentum politik, PAN selalu berkordinasi dengan para pimpinan Muhammadiyah. Para anggota dewan dari fraksi PAN pun juga selalu mengagendakan pertemuan dengan para pimpinan Muhammdiyah untuk meminta pendapat dan nasehat terkait dengan kinerja mereka selama menjadi anggota dewan

**6. Wawancara dengan Arba Riksawan Qomaru, S.E., Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul.**

- A. *Apakah ada kaitan secara struktural antara Muhammadiyah dengan partai politik terkait dengan beberapa kader Muhammadiyah yang aktif di beberapa parpol, khususnya di PAN?*

Tidak ada sangkut pautnya. Beberapa kader aktif di partai, kebetulan jadi kader. Ada salah satu parpol yg banyak anggota Muhammadiyah, kapasitas yang bermacam-macam. Salah satu partai intens menjalin komunikasi, bukan secara organisatoris, karena banyak konstitennya orang-orang Muhammadiyah. Untuk memperjuangkan aspirasi, bukan hanya satu partai, tapi yang punya komitmen kepada Muhammadiyah.

- B. *Bagaimana peta penyebaran kader Muhammadiyah dalam partai politik di Kabupaten Bantul?*

Peta penyebaran kader dalam partai politik di Bantul memang tidak diketahui secara rinci. Hal tersebut dikarenakan Muhammadiyah tidak terlalu mengintervensi kadernya dalam hal berpolitik, Muhammadiyah hanya memberikan pedoman dan kebijakan saja bahwa kader Muhammadiyah tidak boleh aktif sebagai pengurus struktural dalam partai politik. Namun pada kenyataannya beberapa kader Muhammadiyah dijumpai aktif dalam beberapa partai politik yang berbeda. Hal tersebut terjadi pada tataran kader sebagai pengurus tingkat kecamatan maupun kelurahan.

- C. *Bagaimana kekonsistenan Khittah Ujung Pandang terhadap realitas kader Muhammadiyah yang aktif dalam parpol?*

Kebijakan Muhammadiyah sifatnya nasional. Muhammadiyah berusaha bersikap senetral mungkin, tetapi juga berusaha mengakomodir semua kepentingan. Di daerah-daerah tertentu ada yg berbeda, Muhammadiyah tidak dapat mempunisemen karena kepentingan umat berbeda-beda. Jika terjadi tarik ulur dan letupan biasa sebatas tidak melanggar etika organisasi.

- D. *Apakah kader Muhammadiyah boleh aktif dalam partai politik?*

Secara nasional tidak boleh, namun tiap daerah kondisinya berbeda, di Bantul yang tidak diperbolehkan adalah Anggota PDM dan Anggota PCM Pleno. Kami mencoba taat tapi realitasnya berbeda. Di daerah kecamatan Dlingomisalnya, ada yang mengurus PCM, Amal Usaha, Partai politik. Karena memang ia tokoh sentral. Akan berakibat buruk jika dibredel.

E. *Apakah partisipasi Muhammadiyah dalam memantau terkait dengan dinamika dan kondisi perpolitikan di Bantul?*

Melalui beberapa tahapan, mulai dari awal Muhammadiyah mempunyai beberapa kader yang duduk di legislatif maupun eksekutif, bisa dimonitoring. Memantau jalannya raperda, apakah ada persoalan/pasal yg krusial, yg merugikan secara umum.

F. *Bagaimana kebiakan dan tanggapan Muhammadiyah terhadap dinamika perpolitikan yang secara langsung maupun tidak akan menyangkut hajat warga Muhammadiyah?*

Harus ditentukan grandesainnya, kebijakan politik apa yang akan dikeluarkan legislatif dan eksekutif. Mengupayakan nilai-nilai dakwah Muhammadiyah dalam kebijakan-kebijakan negara, bersikap kritis terhadap dinamika perpolitikan nasional. Ikut dalam pembangunan nasional dan mengkaunter isu-isu yang sedang berkembang, seperti melawan korupsi, penegakan hukum, dll... Muhammadiyah harus tau masalah politik ecara luas bukan hanya pragmatis saja..

## **7. Wawancara dengan Sarinto, S.Pd. T, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kab. Bantul**

A. *Dari ketujuh anggota dewan fraksi PAN, berapakah yang merupakan kader Muhammadiyah?*

Dari ketujuh kader PAN tersebut, semuanya merupakan warga Muhammadiyah, bahkan empat diantaranya adalah kader yang pernah menduduki struktural Muhammadiyah. Meski tidak ada kaitan secara struktural dengan Muhammadiyah, namun basis konstituen mereka mayoritas adalah warga Muhammadiyah. Karena kedekatan emosional dan kuatnya pengaruh maka mereka dapat menggunakan basis suara Muhammadiyah secara optimal dan tentunya mereka juga dituntut untuk dapat menyalurkan aspirasi warga Muhammadiyah.

B. *Apakah antara PAN dengan Muhammadiyah memiliki hubungan khusus?*

Tidak ada hubungan secara struktural antara PAN dengan Muhammadiyah. Namun secara kultural kader-kader PAN merupakan aktivis Muhammadiyah.

C. *Bagaimana kaitan PAN dengan Muhammadiyah dalam menyikapi dinamika perpolitikan di Bantul?*

Dalam kaitan sikap Muhammadiyah dalam pertarungan politik di Bantul, Muhammadiyah bisa dikatakan selalu sejalan dengan PAN. Dalam menghadapi setiap momentum politik, PAN selalu

berkoordinasi dengan para pimpinan Muhammadiyah. Para anggota dewan dari fraksi PAN pun juga selalu mengagendakan pertemuan dengan para pimpinan Muhammadiyah untuk meminta pendapat dan nasehat terkait dengan kinerja mereka selama menjadi anggota dewan

*D. Tidak semua warga Muhammadiyah memilih PAN, bagaimana kiat PAN untuk meraih suara warga Muhammadiyah dengan maksimal?*

Untuk menghadapi pemilu 2014, DPD PAN Bantul telah menyiapkan beberapa agenda dan program kegiatan. Diantaranya adalah penjarangan bakal calon legislatif, program pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Untuk menjaga kuantitas suara dari warga Muhammadiyah, saat ini PAN berusaha sekuat tenaga mensosialisasikan kepada warga Muhammadiyah untuk memilih PAN, karena hanya PAN lah partai yang sejalan dengan agenda-agenda Muhammadiyah.

## Lampiran IV:

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. KH. AHMAD DAHLAN

KH. Ahmad Dahlan dilahirkan pada tahun 1868 M (1285 H) di Kampung Kauman Yogyakarta dengan nama Muhammad Darwis. Ayahnya bernama KH. Abu Bakar bin KH. Sulaiman sebagai khotib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ibunya bernama Siti Aminah binti Haji Ibrahim. Haji Ibrahim pernah menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta. KH. Ahmad Dahlan menikah dengan Walidah binti Kyai Penghulu Haji Fadhil pada tahun 1889. Bersama beberapa muridnya, KH. Ahmad Dahlan mendirikan perkumpulan Muhammadiyah pada tahun 1912. Muhammadiyah muncul sebagai gerakan Islam dan bertujuan untuk mengangkat citra muslim melalui berbagai pemikiran dan amal usaha, dengan mengembangkan jiwa nasionalisme di bidang pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan.

#### 2. AR. FACHRUDDIN

KH. Abdur Rozak Fachruddin lahir dari pasangan H. Fakhruddin dan Siti Maemunah binti KH. Idris pada tanggal 14 Februari 1916 di Cilangkap, Purwanggan, Pakualaman, Yogyakarta. Nama kecilnya adalah Muhammad Jazuli. Pada tahun 1923 untuk pertama kalinya ia bersekolah formal di *Standaard School Muhammadiyah* Bausasran Yogyakarta. AR. Fachruddin menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1986 setelah wafatnya KH. Faqih Usman. Ia adalah pemegang rekor paling lama memimpin Muhammadiyah, yaitu selama 22 tahun (1968-1990). Di samping dikenal sebagai mubaligh yang sejuak, ia juga dikenal sebagai penulis yang produktif.

### **3. PROF. DR. H. AMIEN RAIS, MA.**

Prof. Dr. Amien Rais lahir di Solo pada tanggal 26 April 1944. Beliau adalah putra dari Suhud Rais, salah satu lulusan Mu'allimin Muhammadiyah yang semasa hidupnya menjadi pegawai kantor Departemen Agama. Ibunya bernama Sulaimah yang merupakan alumni *Hogere Inladsche Kweekschool (HIK)* Muhammadiyah, kemudian menjadi aktifis Aisyiyah dan pernah menjabat sebagai ketua Aisyiyah Surakarta selama 20 tahun. Amien Rais merupakan anak kedua dari enam bersaudara. Pada masa kecil, ia terbiasa hidup disiplin. Pada tanggal 9 Februari 1969, ia menikah dengan Kusnasriyati Sri Rahayu. Amien Rais dikaruniai lima orang anak, tiga putra dan dua putri. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 tahun 1990 di Yogyakarta, ia terpilih sbagai Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. pada Muktamar ke-43 tahun 1995 di Banda Aceh ia terpilih sebagai Ketua PP Muhammadiyah periode 1995-2000. Ia mendirikan Majelis Amanat Rakyat (MARA) pada tahun 1998 saat terjadi krisis. Pada tanggal 23 Agustus 1998 ia mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN). Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR RI Periode 1999-2004.

### **4. PROF. DR. H. AHMAD SYAFI'I MA'ARIF**

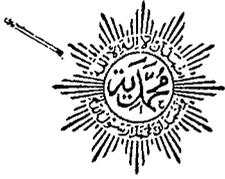
Prof. Dr. H. A. Syafi'i Ma'arif dilahirkan di Sumpurkudus, Sumatera Barat pada 31 Mei 1935 dari pasangan Ma'rifah dan Fathiyah. Setamat dari Sekolh Rakyat Ibtidaiyah pada tahun 1947, ia melanjutkan studinya ke Madrasah Muallimin Lintau Sumatera Barat. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Madrasah Muallimin Yogyakarta dan tamat pada tahun 1956. Ia melanjutkan studi di perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Surakarta. Karena hambatan biaya ia kemudian pindah studi ke jurusan Sejarah IKIP Yogyakarta. Ada tahun 1998 ia menjadi Ketua PP Muhammadiyah melanjutkan kepengurusan Amien Rais sampai tahun 2000. Pada Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta ia dikukuhkan sebagai ketua kembali sampai tahun 2005.

## **5. PROF. DR. DIN SYAMSUDIN**

Prof. Dr. Sirajuddin Syamsuddin dilahirkan di Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat pada 31 Agustus 1958. Istrinya bernama Fira Beranata, ia memiliki tiga orang anak. Pendidikan sarjananya ia tempuh di IAIN Jakarta dan kemudian melanjutkan di pascasarjana dan doktornya di *University of California at Los Angeles (UCLA)* di Amerika Serikat. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang, ia terpilih sebagai Ketua PP Muhammadiyah periode 2005-2010 dan kembali terpilih lagi saat Muktamar ke-46 di Yogyakarta untuk memimpin Muhammadiyah periode 2010-2015. Din Syamsuddin dipandang sebagai sosok pemimpin umat Islam bukan hanya karena dia Ketua Umum Muhammadiyah, tetapi lebih dari itu karena kemampuannya untuk melakukan dialog dengan seluruh elemen umat beragama, baik antr sesama umat Islam maupun dengan umat beragama lainnya.

**Lampiran V:**

# **ARSIP-ARSIP**



# PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANTUL

Sekretariat : Jl. Jend. Basuki Rahmat 06 Bantul Yogyakarta 55711 Telp./Fax. (0274) 367377

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 004/KEP/III.O/D/2011

### PEDOMAN DAN TATA KERJA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANTUL PERIODE 2010-2015

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul :

- Menimbang : a. bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul adalah pimpinan persyarikatan yang berada di Daerahnya.  
b. bahwa didalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan segala tata aturan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.  
c. bahwa dalam rangka memenuhi tata aturan sebagaimana tercantum dalam dictum b. perlu disusun Pedoman Tata Kerja Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah  
2. Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul tahun 2010.
- Memperhatikan : Usul dan saran rapat Pleno PDM pada tanggal 26 Januari 2011

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul tentang Pedoman Tata Kerja Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul periode 2010-2015.

#### BAB I

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Pasal 1

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul adalah Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Daerah dan menjalankan kebijakan pimpinan di atasnya.

##### Pasal 2

Pimpinan Daerah Muhammadiyah mempunyai tugas menentukan kebijakan persyarikatan berdasar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Muhammadiyah serta semua keputusan lembaga Permusyawaratan yang diatur dalam AD/ART, kemudian memimpin dan mengorganisir di tingkat Daerah Kabupaten Bantul.

### Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pimpinan Daerah Muhammadiyah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- A. Mentanfidzkan hasil Musyawarah Daerah Muhammadiyah Kab. Bantul tahun 2010
- B. Memimpin gerakan dakwah dan menjadikan Daerah sebagai pusat administrasi, pusat informasi gerakan tajdid dan pusat peningkatan kualitas sumberdaya manusia lainnya.
- C. Mengimplementasikan program kerja ke dalam program kegiatan majelis/lembaga dibawah tanggungjawab penuh wakil ketua yang dibebani

## BAB II SUSUNAN PERSONALIA

### Pasal 4

Pimpinan Daerah Muhammadiyah mengangkat anggota Penasehat PDM sebagai berikut :

1. Drs. H. Sjuaid Musthofa
2. H. Daldiri
3. HM Fadhil, BA

### Pasal 5

Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul periode 2010-2015 hasil Musdyatahun 2010 adalah sebagai berikut :

Ketua	: Drs. H. Saebani, M.A.
Wakil Ketua I	: Drs. HM. Asrori Ma'ruf, M.Pd.
Wakil Ketua II	: Drs. HM. Syahro Hadiputro
Wakil Ketua III	: Drs. H. Sahari
Wakil Ketua IV	: Drs. H. Imam Nooryanto, M.Pd.
Wakil Ketua V	: Drs. H. Totok Sudarto, M.Pd.
Wakil Ketua VI	: Drs. H. Agus Amarulloh, M.A.
Wakil Ketua VII	: Sugeng Prihatin, S.H.
Wakil Ketua VIII	: Drs. H. Marsudi Iman, M.Ag.
Sekretaris	: Arba Riksawan Qomaru, S.E.
Wakil Sekretaris	: Aris Syamsugito, S.Ag.
Bendahara	: Drs. H. Marzuki, M.Pd.
Wakil Bendahara	: Drs. Dwi Suranto, M.Pd.

Ketua Majelis /Lembaga :

1. Majelis Tarjih dan tajdid : Drs. Bambang Inanta
2. Majelis Tabligh : Hidayatu Rahman, S.Pd.
3. Majelis Dikdasmen : Drs. H. Ekram Prawiroputro, M.Pd.
4. Majelis Pendidikan Kader : H, Sumarna, M.Pd.
5. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan : H. Ahmad Basuni, S.Sos.
6. Majelis Wakal dan Kehartabendaan : H. Jiriban Syarbini, SH, Cn.
7. Majelis Pelayanan Kesehatan Umum : H. Hartadi Prasadjo, S.E.
8. Majelis KUMHAM dan KP : Surwandono, SIP, M.Si
9. Majelis Pelayanan Sosial : Agus Budiantoro, SIP

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 10. Majelis Pemberdayaan Masyarakat         | : Ir. H. Edy Suharyanto, MMA  |
| 11. Majelis Pustaka dan Informasi           | : Drs. H. Waluya, JPE         |
| 12. Majelis Lingkungan Hidup                | : Ir. H. Wakhid, SIP, MA.     |
| 13. Lembaga Pemberdayaan Cabang/Ranting/AUM | : H. Suwandi Danu Subrata     |
| 14. Lembaga Zakat Infaq Shodaqoh            | : Wiranti Prastomo            |
| 15. Lembaga Seni Budaya dan OR              | : Fahrur Rozi, S.Pd.          |
| 16. Lembaga Penanggulangan Bencana MDMC     | : Budi Santosa, S.Psi         |
| 17. Lembaga Bin. dan Was. Keuangan (LPPK)   | : Taufiqurrahman, S.E, M.Acc. |
| 18. Lemb. Pembinaan dan Pemberdayaan Haji   | : Ir. H. Darnawi, MP          |

BAB III  
DESKRIPSI TUGAS (JOB DESCRIPTION)  
Pasal 6

A. Penasehat.

1. Memberi nasehat, saran dan masukan baik diminta maupun tidak terhadap jalannya organisasi.
2. Memberi pertimbangan keputusan-keputusan yang strategis.

B. Ketua

1. Memimpin dan bertanggungjawab secara umum atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul internal maupun eksternal
2. Mewakili PDM Bantul ke institusi lain, baik lingkup persyarikatan, pemerintahan ataupun yang lainnya.
3. Memimpin rapat-rapat yang diselenggarakan oleh PDM Bantul
4. Bertanggungjawab pada program khusus penguatan system organisasi dan konsolidasi pimpinan.
5. Pembina, pengawas dan pengendali bidang keuangan dan asset persyarikatan.

C. Wakil Ketua I

1. Bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
2. Membantu ketua dalam menjalankan tugas dan mewakilinya bila berhalangan. Bertanggungjawab pada program konsolidasi ideologis, pemberdayaan Cabang/Ranting dan AUM serta pembinaan dan pemberdayaan Haji.
3. Bertanggungjawab pada konsolidasi, integrasi, sinergi, serta keberlanjutan :
  - a. Lembaga Pemberdayaan Cabang, Ranting dan Amal Usaha Muhammadiyah
  - b. Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Haji
  - c. Majelis/Lembaga lain yang secara insidental berkait dan terkait dengan program sebagaimana dalam point 2.
4. Bertanggungjawab pada koordinasi, komunikasi dan konsolidasi organisasi se-wilayah PCM Bantul.

D. Wakil Ketua II

1. Bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
2. Membantu ketua dalam menjalankan tugas dan mewakilinya bila berhalangan.
3. Bertanggungjawab pada program Tarjih, tajdid dan Perkembangan Pemikiran Islam, Serta program-program Zakat, Infaq Shodaqoh.
5. Bertanggungjawab pada konsolidasi, integrasi, sinergi, serta keberlanjutan program :
  - a. Majelis Tarjih dan Tajdid
  - b. Lembaga Zakat, Infaq, Shodaqoh.
  - c. Majelis/Lembaga lain yang secara insidental berkait dan terkait dengan program sebagaimana dalam point 3.
6. Bertanggungjawab pada koordinasi, komunikasi dan konsolidasi organisasi se-wilayah PCM Sewon Utara dan Sewon Selatan

E. Wakil Ketua III

1. Bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
2. Membantu ketua dalam menjalankan tugas dan mewakilinya bila berhalangan.
3. Bertanggungjawab pada program Pendidikan Dasar dan Pesantren serta revitalisasi Amal Usaha bidang Pendidikan.
4. Bertanggungjawab pada perencanaan dan keberlangsungan system pembinaan dan pengawasan keuangan persyarikatan
5. Bertanggungjawab pada konsolidasi, integrasi, sinergi, serta keberlanjutan
  - a. Majelis Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - b. Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan
  - c. Majelis/Lembaga lain yang secara insidental berkait dan terkait dengan program sebagaimana dalam point 3 dan 4
6. Bertanggungjawab pada koordinasi, komunikasi dan konsolidasi organisasi se-wilayah PCM Banguntapan Utara dan PCM Banguntapan Selatan.

F. Wakil Ketua IV

1. Bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
2. Membantu ketua dalam menjalankan tugas dan mewakilinya bila berhalangan.
3. Bertanggungjawab pada program Pemberdayaan Masyarakat dan Program Lingkungan Hidup.
4. Bertanggungjawab pada konsolidasi, integrasi, sinergi, serta keberlanjutan :
  - a. Majelis Pemberdayaan Masyarakat.
  - b. Lembaga Lingkungan Hidup
  - c. Majelis/Lembaga lain yang secara insidental berkait dan terkait dengan program sebagaimana dalam point 3.
5. Bertanggungjawab pada koordinasi, komunikasi dan konsolidasi organisasi se-wilayah PCM Bambanglipuro.

G. Wakil Ketua V

1. Bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
2. Membantu ketua dalam menjalankan tugas dan mewakilinya bila berhalangan.
3. Bertanggungjawab pada program Penyiaran Publik, Pustaka dan Manajemen Informasi, Optimalisasi media syiar.
4. Bertanggungjawab pada program Seni Budaya dan Olah Raga,
5. Bertanggungjawab pada konsolidasi, integrasi, sinergi, serta keberlanjutan :
  - a. Majelis Pustaka dan Informasi,
  - b. Lembaga Seni Budaya dan Olah Raga
  - c. Majelis/Lembaga lain yang secara insidental berkait dan terkait dengan program sebagaimana dalam point 3 dan 4.
6. Bertanggungjawab pada koordinasi, komunikasi dan konsolidasi organisasi se-wilayah PCM Dlingo dan PCM Piyungan.

H. Wakil Ketua VI

1. Bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
2. Membantu ketua dalam menjalankan tugas dan mewakilinya bila berhalangan.
3. Bertanggungjawab pada program-program Perkaderan
4. Bertanggungjawab pada program-program Ekonomi dan Kewirausahaan
5. Bertanggungjawab pada konsolidasi, integrasi, sinergi, serta keberlanjutan :
  - a. Majelis Pendidikan Kader
  - b. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
  - c. Majelis/Lembaga lain yang secara insidental berkait dan terkait dengan program sebagaimana dalam point 3 dan 4.
6. Bertanggungjawab pada koordinasi, komunikasi dan konsolidasi organisasi se-wilayah PCM Pandak Timur dan PCM Pandak Barat.

I. Wakil Ketua VII

1. Bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
2. Membantu ketua dalam menjalankan tugas dan mewakilinya bila berhalangan.
3. Bertanggungjawab pada program Wakaf dan Kehartabendan serta optimalisasi asset persyarikatan.
4. Bertanggungjawab bidang advokasi public, Program Bidang Hukum dan HAM, Kajian Politik dan Kebijakan Publik.
5. Bertanggungjawab pada konsolidasi, integrasi, sinergi, serta keberlanjutan :
  - a. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
  - b. Majelis Hukum, HAM dan Kebijakan Publik
  - c. Majelis/Lembaga lain yang secara insidental berkait dan terkait dengan program sebagaimana dalam point 3 dan 4

6. Bertanggungjawab pada koordinasi, komunikasi dan konsolidasi organisasi se-wilayah PCM Kretek dan PCM Jetis

J. Wakil Ketua VIII

1. Bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
2. Membantu ketua dalam menjalankan tugas dan mewakilinya bila berhalangan.
3. Bertanggungjawab pada program Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
4. Bertanggungjawab pada program Manajemen Bencana, dan Program Pelayanan Sosial Kemasyarakatan
5. Bertanggungjawab pada konsolidasi, integrasi, sinergi, serta keberlanjutan :
  - a. Majelis Pelayanan Kesehatan Umum,
  - b. Majelis Pelayanan Sosial dan
  - c. Lembaga Penanggulangan Bencana (MDMC)
  - d. Majelis/Lembaga lain yang secara insidental berkait dan terkait dengan program sebagaimana dalam point 3 dan 4
6. Bertanggungjawab pada koordinasi, komunikasi dan konsolidasi organisasi se-wilayah PCM Pundong.

K. Sekretaris

1. Bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang dibebankan kepadanya.
2. Bertanggungjawab pada keberlangsungan operasional organisasi dengan memproses segala masukan (input) dan setiap keluaran (output) yang diperlukan bagi keberlangsungan organisasi serta mengkaji dan memantau hasil (outcome) dan dampak (impact) yang ditimbulkan.
3. Mengkompilasi hasil rapat serta melakukan implementasi dan perencanaan eksekusi keputusan rapat.
4. Memimpin koordinasi kegiatan sekretariat sebagai institusi penunjang kegiatan persyarikatan.
5. Bertanggungjawab pada koordinasi, komunikasi dan konsolidasi organisasi se-wilayah PCM Sanden

L. Wakil Sekretaris

1. Bertanggungjawab terhadap semua tugas Pimpinan Daerah yang diberikan kepadanya.
2. Membantu tugas-tugas sekretaris dan mewakili bila berhalangan.
3. Bertanggungjawab pada penyelenggaraan rapat serta pendokumentasian rapat-rapat.
4. Mediator dan motivator penyelenggaraan rapat Majelis dan Lembaga
5. Bertanggungjawab pada koordinasi, komunikasi dan konsolidasi organisasi se-wilayah PCM Sedayu dan PCM Kasihan.

M. Bendahara

1. Bertanggungjawab terhadap semua tugas Pimpinan Daerah yang diberikan kepadanya.

2. Bertanggungjawab secara umum kebijakan keuangan dan pengelolaan asset PDM
3. Merencanakan dan merancang system keuangan secara sistemik dan integrative.
4. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi serta pengendalian implementasinya.
5. Bertanggungjawab pada koordinasi, komunikasi dan konsolidasi organisasi se-wilayah PCM Srandakan dan PCM Pajangan

#### N. Wakil Bendahara

1. Bertanggungjawab terhadap semua tugas Pimpinan Daerah yang diberikan kepadanya.
2. Membantu tugas-tugas bendahara dan mewakili bila berhalangan.
3. Merancang system pelaporan keuangan yang credible dan akuntabel.
4. Berkolaborasi dengan LPPK menyusun Sistem Akuntansi Standard
5. Bertanggungjawab pada koordinasi, komunikasi dan konsolidasi organisasi se-wilayah PCM Pleret dan PCM Imogiri.

### BAB IV

#### Rapat-rapat

##### Pasal 7

Rapat Pleno adalah rapat yang menghadirkan seluruh anggota PDM, apabila dipandang perlu, rapat dapat menghadirkan pihak diluar pimpinan harian. Rapat Pimpinan Harian dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu. Bahan rapat pimpinan harian disiapkan oleh sekretaris/wakil sekretaris.

##### Pasal 8

Rapat Pleno diperluas adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota PDM ditambah penasehat dan seluruh ketua majelis dan lembaga dilingkungan PDM Bantul. Ketua majelis/lembaga dapat diwakili oleh anggota majelis yang bersangkutan sepanjang misi yang dibawa berkaitan dengan tugas-tugas majelis / lembaganya . dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali. Bahan rapat pleno adalah keputusan rapat pimpinan harian PDM.

##### Pasal 9

Rapat Koordinasi adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota PDM, penasehat, ketua majelis / lembaga, ketua ortom tk daerah dan atau pimpinan persyarikatan pada level pimpinan yg berbeda, atau pimpinan amal usaha dan atau pihak lain yang dipandang perlu. Rapat pleno diperluas bersifat koordinatif. Bahan rapat pleno diperluas merupakan keputusan rapat harian. Rapat pleno diperluas dilaksanakan secara incidental, sekurang-kurangnya 1 (kali) dalam satu semester.

##### Pasal 10

Rapat terbatas adalah rapat yang dihadiri oleh sebuah team atau sebagian dari anggota PDM yang membahas permasalahan khusus. Dilaksanakan secara insidental tergantung pada permasalahan yang ada.

##### Pasal 11

Rapat Majelis / lembaga adalah rapat yang diselenggarakan oleh pimpinan majelis/lembaga di lingkungan PDM Bantul. Rapat ini harus sepengetahuan dan atas koordinasi wakil ketua PDM yang bertanggungjawab terhadap keberlangsungan program majelis / lembaga tersebut. Apabila keputusan rapat majelis / lembaga bertentangan dengan keputusan persyarikatan, maka PDM berhak membenahi atau membatalkan keputusan tersebut.

## BAB V POLA HUBUNGAN

### Pasal 12

Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah sebagai pemegang amanah utama yang menjalankan persyarikatan di daerahnya serta melaksanakan kebijakan di atasnya. Dalam tugas-tugas tersebut dibantu oleh majelis dan lembaga sebagai penyelenggara usaha persyarikatan.

### Pasal 13

Dalam melaksanakan program kerja, dan memenuhi aspek koordinasi, integrasi, dan kesinambungan majelis lembaga selalu berkoordinasi dengan majelis/lembaga lain dibawah koordinasi Wakil ketua PDM yang bertanggungjawab terhadap program-program yang dibebankannya agar tercapai efektifitas dan efisiensi.

### Pasal 14

Majelis/lembaga mempunyai hak otonomi secara administrasi dan kebijakan internal majelis/lembaga atas sepengetahuan pimpinan persyarikatan. Segala keputusan yang bersifat eksternal harus melalui pimpinan persyarikatan.

## BAB VI KANTOR SEKRETARIAT

### Pasal 15

Kantor sekretariat dipimpin oleh seorang kepala kantor dengan tugas :

- A. Memimpin dan mengendalikan aktifitas kantor secara umum
- B. Memimpin gerakan jamaah dan kehidupan Islami di lingkungan sekretariat PDM
- C. Mengkonsolidasikan tugas-tugas rutin pimpinan
- D. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas incidental pimpinan.
- E. Berperan sebagai sekretaris eksekutif.
- F. Bertanggungjawab terhadap notulensi sidang dan risalah sidang.
- G. Mengatur operasional rumah tangga.

### Pasal 16

Aktifitas surat menyurat dilaksanakan sebagai berikut :

- A. Transaksi surat menyurat bersifat sentral dan dikendalikan oleh penanggungjawab khusus.
- B. Persuratan Majelis / lembaga yang bersifat internal diserahkan ke masing-masing pimpinan majelis.
- C. Persuratan majelis/lembaga yang bersifat eksternal harus sepengetahuan dan kendali pimpinan persyarikatan.

BAB VI  
KEUANGAN  
Pasal 17

Penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Organisasi berlandaskan kepada program-program yang diputuskan dalam Musyawarah Daerah.

Pasal 18

Penggunaan anggaran diatur sebagai berikut :

- A. Penggunaan dana harus sesuai dengan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja dan atau kebijakan pimpinan daerah dengan memperhatikan kemampuan likuiditas keuangan organisasi.
- B. Penggunaan dan diawali dengan pengajuan dana oleh calon pengguna dan dilaporkan dengan SPJ penggunaan dana yang riil.
- C. Penggunaan (pengajuan dan pencairan) dana diluar pembiayaan rutin harus sepengetahuan Ketua dan Bendahara PDM
- D. Pengaturan pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut dalam aturan tersendiri.

Pasal 19  
PENUTUP

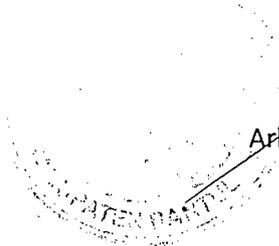
- A. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- B. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diubah/disempurnakan sebagaimana mestinya.
- C. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

NASRUN MINALLAH

Ditetapkan di : Bantul  
Tanggal : 23 Rabi'ul Awwal 1432 H  
Bertepatan : 27 Februari 2011 M

Ketua  
  
Drs. H. Saebani, M.A.  
NBM : 506.282

Sekretaris,  
  
Arba Riksawan Qomaru, S.E.  
NBM : 664.544



BAB VI  
KEUANGAN

Pasal 17

Penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Organisasi berlandaskan kepada program-program yang diputuskan dalam Musyawarah Daerah.

Pasal 18

Penggunaan anggaran diatur sebagai berikut :

- A. Penggunaan dana harus sesuai dengan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja dan atau kebijakan pimpinan daerah dengan memperhatikan kemampuan likuiditas keuangan organisasi.
- B. Penggunaan dan diawali dengan pengajuan dana oleh calon pengguna dan dilaporkan dengan SPJ penggunaan dana yang riil.
- C. Penggunaan (pengajuan dan pencairan) dana diluar pembiayaan rutin harus sepengetahuan Ketua dan Bendahara PDM
- D. Pengaturan pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut dalam aturan tersendiri.

Pasal 19

PENUTUP

- A. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- B. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diubah/disempurnakan sebagaimana mestinya.
- C. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

NASRUN MINALLAH

Ditetapkan di : Bantul

Tanggal : 23 Rabi'ul Awwal 1432 H

Bertepatan : 27 Februari 2011 M

Ketua



Drs. H. Saebani, M.A.  
NBM : 506.282

Sekretaris,



Arba Riksawan Qomaru, S.E.

NBM : 664.544



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/7555/V/9/2012

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Suka Yk Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.1/1414/2012  
Tanggal : 05 September 2012 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : MASDA TANJUNG NIP/NIM : 08370001  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Judul : PERAN MUHAMMADIYAH DALAM PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009-2012 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH  
Lokasi : - Kota/Kab. BANTUL  
Waktu : 07 September 2012 s/d 07 Desember 2012

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 07 September 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



**Tembusan :**

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Bantul cq. Ka. Bappeda
3. Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta
4. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Suka Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/1186 / 239

**Menunjuk Surat** : Dari : Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor : 070/7555/VI/9/2012  
Tanggal : 07 September 2012 Perihal : Ijin Penelitian

**Mengingat** :

- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

**Diizinkan kepada** :

Nama : **MASDA TANJUNG**  
Alamat : Fak. Syaria'ah dan Hukum UIN Suka Yk Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
NIP/NIM/No. KTP : 08370001  
Tema/ : **PERAN MUHAMMADIYAH DALAM PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009 - 2012 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**  
Judul Kegiatan :  
Lokasi : Kabupaten Bantul  
Waktu : 11 September 2012 s.d 07 Desember 2012

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

- Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
- Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
- Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
- Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
- Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
- Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l  
Pada tanggal : 11 September 2012

Kepala,  
Kepala Bidang Data Pengembangan  
dan Penelitian

 **Tlau Sakti Santosa, S.S, M.Hum**  
NIP. 19700105 199903 1006

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Bupati Bantul (sebagai laporan)
- Ka. DPRD Bantul
- Ka. Kantor Kesbangpolinmas Kab. Bantul
- Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul
- Yang Bersangkutan
- Arsip



Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.1/ 1414 /2012  
Sifat : Segera  
Lamp. : 1 exemplar  
Perihal : Permohonan ijin penelitian

Yogyakarta, 5 September 2012

Kepada  
Yth. Gubernur DIY  
c.q. Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan  
Pembangunan Daerah Propinsi DIY.  
Komplek Kepatihan Danurejan  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan (pembuatan skripsi) berjudul :  
**Peran Muhammadiyah dalam Partai Politik di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012 Perspektif Fikih Siyasah** yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut ini :

Nama : **Masda Tanjung**  
NIM. : 08370001  
Jurusan : Jinayah Siyasah (JS)

dengan ini Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Gubernur DIY, c.q. Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah Propinsi DIY, kiranya berkenan memberikan surat pengantar dan izin penelitian ke beberapa tempat di Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut :

1. Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Bantul.
2. Kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kab. Bantul.
3. Kantor DPD Partai Demokrat Kab. Bantul.
4. Kantor DPD Partai Amanat Nasional Kab. Bantul.
5. Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera Kab. Bantul.
6. Kantor DPD II Partai Golongan Karya Kab. Bantul.
7. Pimpinan Fraksi PAN DPRD Kab. Bantul.

Demikian surat permohonan kami, atas izin tersebut kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 197112071995031002



Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.1/ 1414 /2012  
Sifat : Segera  
Lamp. : 1 exemplar  
Perihal : Permohonan ijin penelitian

Yogyakarta, 5 September 2012

Kepada  
Yth. **Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Bantul,**  
di **BANTUL.**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

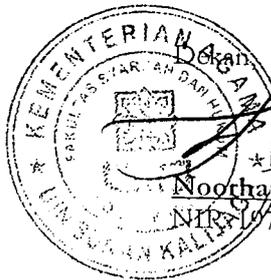
Dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan (pembuat skripsi) berjudul :  
**Peran Muhammadiyah dalam Partai Politik di Kabupaten bantul Tahun 2009-2012 Perspektif Fikih Siyasah** yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut ini :

Nama : **Masda Tanjung**  
NIM. : 08370001  
Jurusan : Jinayah Siyasah (JS)

dengan ini Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada **Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Bantul**, kiranya berkenan menerima mahasiswa tersebut di atas untuk mengadakan wawancara dan minta data-data atau dokumen yang akurat terkait dengan pembuatan skripsi.

Demikian surat permohonan kami, atas izin tersebut kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



**Noothaedi, M.A., M.Phil., Ph.D.**

NIR 19711207 199503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281



Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.1/ **1414** /2012  
Sifat : Segera  
Lamp. : 1 exemplar  
Perihal : Permohonan ijin penelitian

Yogyakarta, 5 September 2012

Kepada  
Yth. **Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kab. Bantul,**  
di **BANTUL.**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

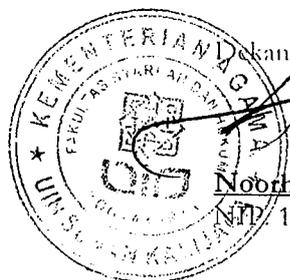
Dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan (pembuatan skripsi) berjudul :  
**Peran Muhammadiyah dalam Partai Politik di Kabupaten bantul Tahun 2009-2012 Perspektif Fikih Siyasah** yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut ini :

Nama : **Masda Tanjung**  
NIM. : 08370001  
Jurusan : Jinayah Siyasah (JS)

dengan ini Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada **Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kab. Bantul**, kiranya berkenan menerima mahasiswa tersebut di atas untuk mengadakan wawancara dan minta data-data atau dokumen yang akurat terkait dengan pembuatan skripsi.

Demikian surat permohonan kami, atas izin tersebut kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan,  
**Nobrhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711207 199503 1 002



Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.1/ **1414** /2012  
Sifat : Segera  
Lamp. : 1 exemplar  
Perihal : Permohonan ijin penelitian

Yogyakarta, 5 September 2012

Kepada  
Yth. **Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kab. Bantul,**  
di **BANTUL.**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

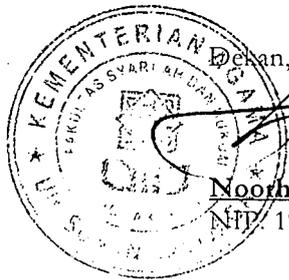
Dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan (pembuatan skripsi) berjudul :  
**Peran Muhammadiyah dalam Partai Politik di Kabupaten bantul Tahun 2009-2012 Perspektif Fikih Siyasah** yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut ini :

Nama : **Masda Tanjung**  
NIM. : 08370001  
Jurusan : Jinayah Siyasah (JS)

dengan ini Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada **Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kab. Bantul**, kiranya berkenan menerima mahasiswa tersebut di atas untuk mengadakan wawancara dan minta data-data atau dokumen yang akurat terkait dengan pembuatan skripsi.

Demikian surat permohonan kami, atas izin tersebut kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



**Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711207 199503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840. Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281



Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.1/ 1414 /2012  
Sifat : Segera  
Lamp. : 1 exemplar  
Perihal : Permohonan ijin penelitian

Yogyakarta, 5 September 2012

Kepada  
Yth. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kab. Bantul  
di BANTUL.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

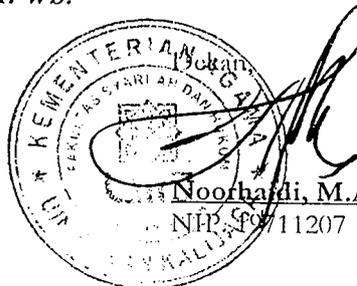
Dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan (pembuatan skripsi) berjudul :  
**Peran Muhammadiyah dalam Partai Politik di Kabupaten bantul Tahun 2009-2012 Perspektif Fikih Siyasah** yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut ini :

Nama : Masda Tanjung  
NIM. : 08370001  
Jurusan : Jinayah Siyasah (JS)

dengan ini Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada **Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kab. Bantul**, kiranya berkenan menerima mahasiswa tersebut di atas untuk mengadakan wawancara dan minta data-data atau dokumen yang akurat terkait dengan pembuatan skripsi.

Demikian surat permohonan kami, atas izin tersebut kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

  
**Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711207 199503 1 002



Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.1/ 1414 /2012  
Sifat : Segera  
Lamp. : 1 exemplar  
Perihal : Permohonan ijin penelitian

Yogyakarta, 5 September 2012

Kepada  
Yth. **Ketua DPD Partai Demokrat Kab. Bantul,**  
di **BANTUL.**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

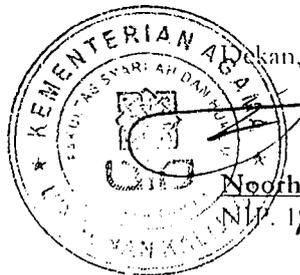
Dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan (pembuatan skripsi) berjudul :  
**Peran Muhammadiyah dalam Partai Politik di Kabupaten bantul Tahun 2009-2012 Perspektif Fikih Siyasah** yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut ini :

Nama : **Masda Tanjung**  
NIM. : 08370001  
Jurusan : Jinayah Siyasah (JS)

dengan ini Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada **Ketua DPD Partai Demokrat Kab. Bantul**, kiranya berkenan menerima mahasiswa tersebut di atas untuk mengadakan wawancara dan minta data-data atau dokumen yang akurat terkait dengan pembuatan skripsi.

Demikian surat permohonan kami, atas izin tersebut kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan,  
**Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711207 199503 1 002



Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.1/ 1414 /2012  
Sifat : Segera  
Lamp. : 1 exemplar  
Perihal : Permohonan ijin penelitian

Yogyakarta, 5 September 2012

Kepada  
Yth. **Ketua DPD II Partai Golongan Kab. Bantul,**  
di **BANTUL.**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan (pembuatan skripsi) berjudul :  
**Peran Muhammadiyah dalam Partai Politik di Kabupaten bantul Tahun 2009-2012 Perspektif Fikih Siyasah** yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut ini :

Nama : **Masda Tanjung**  
NIM. : 08370001  
Jurusan : **Jinayah Siyasah (JS)**

dengan ini Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada **Ketua DPD II Partai Golongan Karya Kab. Bantul**, kiranya berkenan menerima mahasiswa tersebut di atas untuk mengadakan wawancara dan minta data-data atau dokumen yang akurat terkait dengan pembuatan skripsi.

Demikian surat permohonan kami, atas izin tersebut kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan,

  
**Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.**

NIP. 19711207 199503 1 002

## **Lampiran VI:**

### **Curriculum Vitae**

Nama : Masda Tanjung  
NIM : 08370001  
Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 30 Agustus 1988  
Alamat : Kedon Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul Yogyakarta  
Jurusan/ Fakultas : Jinayah Siyasah/ Syariah dan Hukum  
Angkatan : 2008  
E-Mail/No Telp. : Akhi\_masda@yahoo.com / 081578761301  
Nama Orangtua : Ayah : H. Sukarjan SP, S.Pd  
Ibu : Istiqomah

#### **Riwayat Pendidikan:**

1. TK ABA Kedon Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul (1994-1995)
2. SD Negeri Kaligondang Sumbermulyo Bambanglipuro (1995-2001)
3. SMP Negeri 1 Bantul Yogyakarta (2001-2004)
4. SMA Negeri 2 Bantul Yogyakarta (2004-2007)

#### **Riwayat Organisasi:**

1. Anggota Muhammadiyah
2. Ketua Remaja Masjid Kedon (2010-2012)
3. Bidang Kurikulum TPA Nurul Islam Kedon (2012-sekarang)
4. Divisi Remaja Masjid Takmir Mushola Nurul Islam Kedon (2008-sekarang)
5. Anggota Takmir Masjid Al-Fath Kedon (2008-sekarang)
6. Pembina I Islam Muda Takwa (ImuT) Kedon (2010-sekarang)
7. Bidang Kaderisasi IKLAQ (Ikatan Alumni Rohis Al-Falaq) SMA N 2 Bantul (2008-2010)
8. Ketua II Forum Studi Politik Jinayah Siyasah (FORSPOL) (2009)
9. Staf Bidang Kaderisasi Corps Dakwah Sekolah Kab. Bantul (2010-2013)
10. Anggota Biasa (AB) 1 KAMMI UIN Sunan Kalijaga (2008-2012)
11. Staf Kaderisasi Partai PAS UIN Sunan Kalijaga (2009-2010)